

PERAN *WORLD FOOD PROGRAMME* (WFP) DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA TAHUN 2012-2015

Made Ayu Khesia Khorinna¹⁾, Idin Fasisaka²⁾, Adi P. Suwecawangsa³⁾
^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: khesiakhorinna@unud.ac.id¹⁾, idinfasisaka@unud.ac.id²⁾, adisuwecawangsa@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

Fulfillment of the food security in Indonesia has been pursued since the pre-reform era. One significant cause in meeting the desired level of food security in Indonesia is the population's over-growth. WFP is an organization that was originally formed as a program that distributes food to disaster areas, but with increasingly dynamic and broad problems, WFP is also recognized by the United Nations and moves under the auspices of the General Assembly. The problems faced are also increasingly widespread in the field of food fulfillment. Since 2012, WFP changed its role in Indonesia from organizations that provide direct assistance to become a strategic partner for Indonesia. Where they act more as consultants who help Indonesia in finding sources of food problems. WFP itself is more concentrated in analyzing and assisting Indonesia in policies related to food security.

Keywords: *food security, Indonesia, WFP, international organization*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hubungan internasional yang merupakan hubungan antar bangsa dalam semua aspek dan dilakukan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Hubungan internasional pun mencakup sebagian besar aspek kehidupan masyarakat. Isu-isu yang melibatkan ekonomi dan lingkungan hidup merupakan isu-isu hubungan internasional yang mendapatkan perhatian lebih dari para aktor hubungan internasional.

Lingkungan global saat ini sedang mengalami perubahan. Dapat diketahui bahwa saat ini kondisi alam sedang tidak stabil dibanding dahulu dan hal tersebut

memiliki kaitan yang erat dengan aktifitas buruk manusia di berbagai belahan dunia yang mengeksploitasi kekayaan alamnya. Kerusakan lingkungan juga dimulai dari maraknya perusakan hutan melalui penebangan liar. Hal tersebut dapat memicu bencana kelaparan yang disertai dengan krisis pangan. Selain itu, perkembangan jumlah penduduk di dunia yang terjadi secara terus menerus hampir mencapai 7 miliar jiwa. Hal ini mengancam kelangsungan hidup manusia. Sejak dekade 1980, *Food and Agriculture Organisation* (FAO) memprediksikan bahwa dalam 30 tahun kedepan, peningkatan produksi pangan akan melebihi pertumbuhan penduduk dunia. Prediksi tersebut berdasarkan data bahwa produksi pangan di dunia meningkat rata-rata

2,1% per tahunnya sedangkan penduduk dunia tumbuh dengan laju hanya 1,6% per tahunnya (Husodo, 2002). Namun, di tahun 2007 keadaan menunjukkan adanya krisis pangan yang disebabkan oleh peningkatan laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, sehingga lahan pertanian semakin sempit. Hal tersebut akhirnya berdampak kepada kegiatan pertanian yang semakin terbatas yang juga berdampak kepada krisis pangan dunia dan menjadi suatu isu yang tidak dapat dihindari termasuk di Indonesia (Tambunan, 2008).

Pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia menjadi sebuah tantangan tersendiri dikarenakan keadaan negara yang berbentuk kepulauan. Daerah yang rawan pangan di Indonesia di dominasi oleh pulau-pulau bagian Indonesia timur yang termasuk daerah yang cukup jauh dari pusat ibu kota Indonesia. Sehingga terjadi kesulitan dalam pelaksanaan distribusi pangan ke daerah-daerah tersebut.

Masih banyak daerah-daerah yang belum ditanggulangi atas kerawanan pangan. Indonesia sebelumnya memiliki komitmen di mata dunia untuk mengurangi rawan pangan melalui *World Food Summit* 1996 dan legitimasi ketahanan pangan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 dan diturunkan sebagai peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Ketahanan pangan Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah karena semakin meningkat jumlah penduduk berdampak kepada kebutuhan pangan penduduk dan

juga kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Ketahanan pangan Indonesia juga menjadi fokus negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan program *World Food Programme* (WFP) telah memberikan bantuan pangan untuk Indonesia. WFP sebagai salah satu badan PBB memiliki tugas dari *World Food Summit* untuk mengurangi kelaparan dan kemiskinan global (Dewanti, 2016).

Sejak tahun 1964, WFP memberi bantuan pangan sejumlah satu juta dolar amerika saat peristiwa meletusnya Gunung Agung di Bali yang kemudian berjalannya waktu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk bekerja sama sebagai mitra strategis dengan WFP untuk memelihara ketahanan pangan pada Tahun 2012 (WFP, Indonesia Programme, 2012). Hal diatas yang melatarbelakangi penulis untuk mengetahui peran WFP membantu Indonesia meningkatkan ketahanan pangan tahun 2012-2015.

2.KAJIAN PUSTAKA

Adapun beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, penelitian pertama adalah dari Maifathul Jannah yang membahas tentang peran *World Food Programme* (WFP) di Suriah. Menurut Maifathul Jannah program *World Food Programme* (WFP) yang dijalankan di Suriah tergolong cukup berhasil. Program tersebut diantaranya adalah menggalang dana bantuan untuk krisis pangan yang terjadi

akibat perang sipil di Suriah melalui media cetak dan halaman web *World Food Programme* (WFP), di Geneva juga diadakan acara amal terbesar yang diadakan oleh *World Food Programme* (WFP) dimana *World Food Programme* (WFP) dapat menggalang dana hingga 6 miliar dollar untuk membantu korban perang sipil suriah dan menjalankan program lainnya di Suriah. Distribusi bantuan terdiri dari dana dan voucher, pengiriman barang, pangan, dan makanan bernutrisi, serta pendidikan tentang pangan. Menurut analisa dari maifathul jannah bantuan dari *World Food Programme* (WFP) di Suriah cukup memiliki peran yang positif terhadap masyarakat di lokasi konflik walaupun banyak batasan yang membatasi optimalisasi kinerja *World Food Programme* (WFP) di Suriah, dimana ini merupakan suatu isu prioritas dan kemanan bagi Negara pendonor.(Jannah, 2014).

Penelitian kedua yang akan dibahas oleh penulis dilaksanakan oleh Rani Hariani yang membahas tentang peran *World Food Programme* (WFP) di Sierra Leone pada tahun 2009-2011. Dalam penelitian ini, Rani Hariani membahas tentang peran *World Food Programme* (WFP) di Sierra Leone dalam menangani krisis pangan yang terjadi disana. Program yang dijalankan *World Food Programme* (WFP) di Sierra Leone bertujuan untuk memperbaiki kehidupan dan meningkatkan asupan nutrisi untuk anak-anak dan wanita hamil di Sierra Leone. (Hariani, 2017)

Konsep dasar yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini adalah Peran Organisasi Internasional dan konsepsi dari ketahanan pangan (*food security*).

Peranan organisasi internasional, peneliti mengambil peranan internasional Clive Archer (2001) yang dibagi tiga yakni peran instrumen, peran forum dan peran aktor.

1. Peran instrumen; organisasi internasional berperan sebagai alat untuk mengejar kepentingan negara-negara melalui politik luar negerinya.
2. Peran forum; organisasi internasional dapat sebagai wadah terjadinya kegiatan-kegiatan organisasi. Wadah yang diperlukan negara-negara untuk membahas suatu masalah yang dihadapi. Organisasi internasional juga dapat sebagai alat tawar-menawar untuk membatasi negara dalam mengambil kebijakan tertentu.
3. Peran aktor; organisasi internasional dapat bertindak atau membuat keputusan-keputusan tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan eksternal di panggung internasional (Archer, 2001).

Karen Mingst (2015) mendeskripsikan bahwa ada 4 tahapan yang dapat dijalankan sebuah organisasi internasional dalam menjalankan perannya di suatu negara, yakni

1. *Getting states to act* yaitu peran dimana organisasi internasional mengajak suatu negara untuk

bertindak dalam menangani suatu masalah

2. *Coordinating the efforts of different groups* yaitu peran organisasi internasional dalam dalam mengkoordinasikan upaya dari kelompok yang berbeda
3. *Providing the diplomatic skills to secure agreements* yaitu organisasi internasional berperan dalam menyediakan wadah dan sarana diplomatik untuk melakukan perjanjian
4. *Ensuring programs effectiveness* yaitu peran organisasi internasional dalam menjamin keefektifan pelaksanaan sebuah program di suatu negara

Apabila keempat peran ini sudah dilaksanakan sebuah organisasi internasional di suatu negara, maka dari itu program pembangunan dapat dijalankan sesuai pedoman dan susunan struktur internasional. (Mingst, Karns, & Stiles, 2015)

Secara keseluruhan pertahanan dan keamanan nasional memang harus disambungkan dengan pembangunan pada bidang kesejahteraan sehingga pembangunan nasional berjalan optimal. Jadi, untuk pencapaian tujuan dan sasaran selain pembangunan bidang kesejahteraan, mengalokasikan sumber daya nasional juga harus ditingkatkan.

Maka, munculah istilah ketahanan pangan (*food security*), karena ketahanan pangan dengan sektor produksi suatu negara

memiliki kaitan yang erat yang kemudian berpengaruh pada devisa yang akan bermanfaat dalam sektor ekspor yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, ketahanan pangan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik suatu negara, seperti halnya mengenai persetujuan kerja sama antar aktor dalam sektor pangan, kebijakan-kebijakan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Menurut UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, disebutkan ketahanan pangan sebagai

“kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.”(Undang-Undang, 1996)

Pengertian dari UU tersebut mencakup berbagai aspek baik makro maupun mikro. Pada aspek makro ia mencakupmemadainya ketersediaan pangan, dan pada aspek mikro yaitu kebutuhan pangan terpenuhi bagi setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif. Tingkat ketahanan pangan secara nasional di artikan sebagai mampunya suatu bangsa dalam penjaminan setiap individu penduduknya terhadap perolehan pangan yang cukup, baik mutu kelayakannya dan keamanannya yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal.

Ketahanan pangan merupakan hasil dari sistem pangan yang beroperasi secara

efisien. Sistem pangan yang efisien memberi kontribusi positif terhadap semua aspek ketahanan pangan, yakni:

a. Ketersediaan Makanan (*Food Availability*)

Aspek ini melihat ketahanan pangan dan mengharapkan jumlah makanan berkualitas yang cukup dari produksi pertanian dalam negeri atau impor. Hal tersebut dapat dinilai dari catatan neraca makanan, survei pasar makanan, produksi pertanian dan indikator dari tingkat kesuburan, waktu panen, penyimpanan bahan pokok, dan lain-lain.

b. Akses Makanan

Akses makanan adalah aspek ketahanan pangan yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan kapasitas pembelian rumah tangga atau individu. Akses ini seharusnya memiliki cukup sumber daya untuk memperoleh makanan berkualitas yang sesuai. Indikatornya seperti harga pangan, tingkat upah, konsumsi makanan per kapita, frekuensi makan, tingkat lapangan kerja, dan lain-lain.

c. Pemanfaatan Makanan

Dalam aspek ini tidak hanya memperhatikan berapa banyak makanan yang dimakan tetapi juga apa dan bagaimana mereka makan. Hal ini juga mencakup persiapan makanan, distribusi makanan di dalam rumah tangga, air dan sanitasi dan perawatan kesehatan. Selain itu, hasil gizi dari makanan yang dimakan oleh seseorang juga berpengaruh. Penyakit yang muncul seperti diare, usia, dan yang lain-lain tidak

terlalu berpengaruh, karena hal tersebut tergantung kepada demografi dan kesehatan.

d. Stabilitas

Aspek ini berkaitan dengan ketiga aspek lainnya. Makanan tidak bisa dikatakan mencukupi atau aman setiap waktu. Kita harus menjaga kestabilan ketersediaan makanan, aksesibilitas, dan kondisi pemanfaatan makanan yang tepat. Ketidakstabilan harga pasar mengenai makanan pokok dan resiko yang tidak terduga seperti kondisi buruk (bencana alam, cuaca, dan lain-lain), lalu ketidakstabilan politik dan pengangguran merupakan faktor utama yang mempengaruhi aspek stabilitas ketahanan pangan.

Jadi, sifat dinamis ketahanan pangan yang dimaksud sangat rentan mengalami masalah pangan di masa yang akan datang. Kerentanan tersebut dikhawatirkan dalam berbagai faktor resiko, ketidakmampuan negara yang tidak dapat mengelola dan memahami resiko, dan rentan terhadap hasil yang sudah dilakukan. Hal ini tugas WFP agar dapat mengetahui solusi-solusi untuk memerangi kelaparan di negara-negara yang terbiasa terkena kelaparan, khususnya Indonesia. Hadirnya WFP diharapkan untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Karena diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan terus bertambah dan kompetisi pemanfaat komoditas pangan antara *food-feed-fuel*.

Kerangka konseptual keamanan pangan yang standar biasanya mengacu pada gagasan hierarki kebutuhan masyarakat. Asumsinya adalah “makanan yang pertama” dimana ketahanan pangan merupakan kebutuhan utama yang menggantikan kebutuhan manusia lainnya. Dan menurut UNICEF di tahun 1990, bisa diambil analisa bahwa bukti perilaku orang sangat menantang pada asumsi tersebut. Karena diakui bahwa seharusnya melindungi asupan atau pasokan makanan terutama yang jangka pendek hanya bisa dikejar dengan satu tujuan (UNICEF, 1990).

3.METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami objek penelitian seperti individu, lembaga berdasarkan fakta-fakta yang ada.

4.PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi yang kebutuhan pangan masyarakat terpenuhinya dicerminkan dari cukupnya persediaan pangan, secara jumlah dan mutunya, dalam kondisi aman, tersedia merata, harga terjangkau bagi masyarakat, dengan menggunakan keragaman sumber daya lokal sebagai basis. Sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, sistem distribusi, dan pola konsumsi disebut dengan ketahanan pangan. Fungsi dari sub sistem ketersediaan pangan adalah memberijaminan pasokan pangan bagi seluruh penduduk, secara kuantitas dan kualitas, memberikan

keragaman, sertamenjamin keamanannya. Sub sistem distribusi mempunyai fungsi dalam membangun sistem distribusi yang lebih efektif serta efisien sehingga seluruh rumah tangga terjamin untuk memperoleh pangan yang cukup jumlahnya serta cukup setiap saat, dan terjangkau harga. FAO tahun 1996 dan UU RI No. 7 Tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan dari empat komponen menentukan tercapainya kondisi ketahanan pangan. Komponen tersebut adalah:

1. Ketersediaan pangan yang cukup
2. Ketersediaan pangan yang stabil tanpa adanya perubahandisetiap musim ataupunsetiap tahun
3. Aksesibilitas dan terjangkau pangan
4. Keamanan ketersediaan pangan

Dalam ketahanan pangan, Indonesia termasuk di dalam level serius pada indeks kelaparan global. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) yang dibuat pada tahun 2015 oleh BKP bersama WFP ini meliputi 32 provinsi dan 398 kabupaten. Terdapat 58 kabupaten dari 398 (15 persen) merupakan kabupaten yang rentan terhadap kerawanan pangan, sejumlah 136 kabupaten dari 398 desa (34 persen) berada pada tingkat kerentanan sedang, dan hanya 51 persen desa dari 398 desa yang distudi merupakan kabupaten yang tergolong tahan pangan.

Kondisi ini diprediksi akan memburuk dimasa yang akan

datang mengingat pertambahan penduduk di Indonesia yang tinggi. Kondisi langka pangan juga bisa terjadi akibat dari kondisi lingkungan yang rusak, alih fungsi lahan, langkanya bahan bakar fosil, serta pemanasan global.

Menurut *Food Agricultural Organisation* (FAO) kelaparan masih di alami oleh 19,4 juta penduduk Indonesia. Kemiskinan dan kelangkaan bahan makanan pokok adalah penyebab utamanya. Ternyata di Indonesia, sebagian besar penduduknya memiliki belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya pangan, terutama penduduk Indonesia bagian timur, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Terjadi penurunan persentase penduduk Indonesia yang kelaparan dari 19,7% di tahun 1990-1992 menjadi hanya 7,9% di tahun 2014-2016. Hal ini akibat dari pesatnya pertumbuhan ekonomi yang membantu menurunkan angka kelaparan di Indonesia. Meskipun angka kemiskinan telah berhasil diturunkan hingga 50%, Indonesia belum mampu mengurangi jumlah penduduk bergizi buruk, terutama anak-anak dibawah usia 5 tahun.

Pangan, kita ketahui merupakan kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, yang berperan sangat penting serta sangat berarti untuk kehidupan bangsa. Adanya ketimpangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhannya mengakibatkan ekonomi tidak stabil. Terganggunya ketahanan pangan juga akan mengaibakkan munculnya permasalahan sosial serta

permasalahan politik. Kondisi tersebut dapat membahayakan kestabilan ekonomi dan stabilitas nasional. Masyarakat Indonesia selalu menganggap pangan identik dengan beras karena beras merupakan bahan pokok utama.

Pemenuhan gizi masyarakat bersumber dari beras. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia selalu berupaya meningkatkan produksi beras untuk mencapai ketahanan pangan dalam negeri. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat maka pertimbangan untuk terus meningkatkan produksi beras menjadi semakin penting bagi Indonesia., Indonesia juga membutuhkan ketersediaan pangan yang cukup besar untuk mencukupi kebutuhan dan memenuhi konsumsi masyarakat maupun sebagai stok nasional.

Sebetulnya pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mencapai ketahanan pangan salah satunya adalah dengan menuju pangan berdaulat (*food sovereignty*), mandiri pangan (*food resilience*), serta keamanan pangan (*food safety*). Upaya dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui peningkatan produksi beras sudah berhasil walaupun sempat terjadi penurunan pada periode awal reformasi. Peningkatan produksi selalu dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan penduduk yang lebih besar mengakibatkan masih belum tercapainya ketahanan pangan di Indonesia.

Berbagai upaya untuk sudah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan

ketahanan pangan. Gerakan Revolusi Hijau meruapan salah satu program pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan. Sejak era Pemerintahan Soeharto sudah dijalankan Gerakan Revolusi Hijau di Indonesia. Program Revolusi Hijau telah menghasilkan peningkatan yang cepat produksi padi di Indonesia, sehingga swasembada beras tercapai pada tahun 1984. Namun program ini kurang mampu menjadikan Indonesia berswasembada pangan secara menerus akibat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi membayangi keberhasilan produksi beras.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa pangan negara dapat mengalami kekacauan, pangan berperan penting dalam ketahanan suatu bangsa, sosial dan politik. Kelembagaan ketahanan pangan dibentuk atas kesadaran pemerintahan Indonesia dimulai sejak jaman Belanda hingga saat ini, dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan beras, sebagai pangan masyarakat.

Keberhasilan produksi pertanian pada saat ditangani oleh kelembagaan yang khusus membidangi masalah pertanian telah dapat memenuhi kebutuhan pangan. Persoalan ketahanan pangan akan selalu diiringi dengan adanya persoalan pertanian, dan keberhasilan membangun ketahanan pangan tidak akan dapat dicapai tanpa melakukan pembangunan sektor pertanian (BKP, 2006). Oleh sebab itu kelembagaan ketahanan pangan akan berkembang seiring dengan berkembangnya kelembagaan pertanian di Indonesia.

Berdirinya organisasi WFP pada tahun 1961, penggagasnya George McGovern pada pemerintahan Presiden John F. Kennedy (Shaw, 2001).

Sebagai program yang dibentuk untuk membantu PBB yang menangani bantuan pangan, WFP terbukti sebagai organisasi yang dibutuhkan dan bermanfaat setelah ikut berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Setelah melalui beberapa operasi yang diselesaikan kemudian WFP pertama kali dan mulai ditugas secara sah oleh PBB pada tahun 1963 dengan tugas menyalurkan bantuan pangan dan memberi dukungan pada pembangunan sosial dan ekonomi, menyiapkan bantuan makan dan logistik lainnya jika terjadi keadaan darurat, dan juga mendorong tercapainya ketahanan pangan dunia.

Programnya di Indonesia pada tahun 2012-2015 juga mencerminkan pergeseran peran WFP dari hubungan langsung operasional ke arah pengembangan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan ketahanan pangan dan gizi. Selain itu, WFP mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kapasitasnya untuk menangani daerah yang rentan pangan dan gizi serta dalam kewaspadaan dalam menangani bencana melalui bantuan teknis, proyek-proyek percontohan serta dukungan dari segi kebijakan.

Berdasarkan *Country Programme* Indonesia untuk tahun 2012-2015, program-

program WFP di Indonesia sebagian besar akan dilaksanakan di wilayah Indonesia Timur. Program-program WFP tersebut terdiri dari 3 program utama, yaitu (Kemenlu, 2015):

- a. *Food Security Analysis, Monitoring and Mapping*
- b. *Disaster Risk Reduction and Management*
- c. *Nutrition / Social Safety Net.*

Program WFP di Indonesia yang dijalankan dalam periode 2012-2015 sudah memberikan hasil yang cukup baik. Sebagai Negara besar dengan jumlah penduduk miskin yang terus meningkat mengakibatkan semakin banyaknya orang yang menghadapi rawan pangan di Indonesia. Adanya beberapa daerah yang mengalami kasus-kasus rawan pangan, membuktikan bahwa Negara ini belum mencapai ketahanan pangan yang kuat, masalah rawan pangan menjadi masalah yang rumit dan kompleks serta tidak dapat diatasi dengan hanya satu usaha,.

Informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik merupakan penyokong antisipasi persoalan rawan pangan dan gizi buruk. Sehingga untuk menangani daerah dengan rentan pangan dibutuhkan suatu penanganan yang tepa.

WFP bersama dengan Dewan Ketahanan Pangan dan Badan Ketahanan Pangan Indonesia telah memetakan ketahanan serta kerentanan pangan Indonesia atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). Terdapat 13

indikator yang digunakan FSVA dalam mengetahui keberhasilan berbagai aspek ketahanan pangan dan gizi di setiap Kabupaten. Indikator-indikator tersebut dibagi menjadi dua kelompok indikator terdiri dari: kerawanan pangan dan gizi kronis serta kerawanan pangan transien. Faktor iklim dan lingkungan yang memberi pengaruh kepada aspek ketersediaan dan akses pangan kerawanan pangan dijelaskan dalam indikator transien. Sedangkan indikator yang digunakan dalam mengukur ketersediaan dan akses terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan adalah indikator kerawanan pangan kronis. Kemudian keseluruhan indikator yang terkait dengan kerawanan pangan kronis digabungkan menjadi satu indikator komposit. Indikator komposit digunakan untuk mengukur secara menyeluruh kondisi ketahanan pangan kabupaten target kemudian dibuatkan peringkat untuk masing-masing kabupaten.

WFP memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk menangani tantangan-tantangan yang ada:

Akses ekonomi

Pemerintah perlu meningkatkan dana untuk pelaksanaan program bantuan sosial yang juga mengkombinasikan inovasi baru dalam upaya meningkatkan efektivitas dan sensitivitas gizi, sehingga diperoleh berdampak terhadap akses pangan secara signifikan.

Gizi

Dibutuhkan peningkatan koordinasi lintas di lembaga Pemerintahan untuk menanggulangi hambatan dalam kelembagaan ketika proses membuat kebijakan dan program, untuk meningkatkan kepedulian akan gizi dari program peningkatan kesejahteraan, program pertanian dan program perubahan iklim. Melanjutkan program Raskin yang terbukti sebagai cara murah untuk peningkatan asupan gizi mikro keluarga yang berpenghasilan kecil.

Perubahan iklim

Peningkatan sistem peringatan dini untuk bencana yang terprediksi (slow-onset) dan mendadak (sudden-onset) yang berhubungan dengan perubahan iklim juga merupakan peluang yang dapat dilakukan. Alokasi anggaran Litbang bidang tanaman yang mampu bertahan terhadap kondisi perubahan iklim serta jenis hama baru, juga butuh ditingkatkan.

5. KESIMPULAN

Sebagai mitra strategis pemerintah Indonesia, WFP pada periode 2012-2015 telah berperan aktif dan memberikan dampak yang positif dalam membantu upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Pemerintah dibantu WFP telah menerbitkan Peta ketahanan pangan Indonesia, *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* yang menjadi pedoman pemerintah maupun pemegang kepentingan lainnya dalam membuat kebijakan atau program dalam

upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Akibat dari perbaikan pada beberapa kriteria ketahanan pangan dan gizi telah meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Indonesia pada tahun 2009 dan tahun 2015. WFP juga mengidentifikasi 3 tantangan utama yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah untuk mencapai target ketahanan pangan: (1) keterjangkauan ekonomi atau keuangan meningkat untuk memperoleh pangan, serta penanaman modal untuk infrastruktur, (2) Mencegah dan menurunkan angka kekurangan gizi dengan akselerasi intervensi (3) Mengatasi ketidakmampuan menghadapi resiko peningkatan perubahan iklim.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Archer, C. (2001). *International Organizations*. London: Routledge.
- Bowett, D. W. (1992). *Hukum Organisasi Internasional, Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- DKP, & WFP. (2015). *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan Indonesia dan World Food Programme Indonesia.
- Husodo, S. Y. (2002, Februari 27-28). *Membangun Kemandirian di Bidang Pangan untuk Memperkuat Ketahanan Nasional*.
- OECD. (2009). *DAC1 Official and Private Flow*. Development.

- Rudy, T. M. (2005). *Adminitrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Shaw, D. J. (2001). *The UN World Food Programme and the Development od Food Aid*. London: Palgrave Macmillan UK.
- UNICEF. (1990). *Strategy for Improved Nutrition of Children and Women in Developing Countries*. New York: UNICEF.
- Valdes, A. (1981). *Food Security For Developing Countries*. Colorado: Boulder: Westview.

Website

- Dewanti, E. (2016, Agustus 18). <http://www.gps.hi.unikom.ac.id/download/Elin-Dewanti.pdf>. Retrieved Juni 2017, from <http://www.gps.hi.unikom.ac.id/>: <http://www.gps.hi.unikom.ac.id/download/Elin-Dewanti.pdf>
- Nurhemi, S. R., & Sukro, G. S. (2014, Desember). <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp276267>.
- WFP. (2009). *Emergency Assesment Handbook*. Retrieved Juni 2017, from World Food Programme: <http://www1.wfp.org>